Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia

Helwati¹, Rachmadi Usman²

^{1,2} Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: helwaalhafidzoh@gmail.com¹, rachmadi.usman@ulm.ac.id²

Abstrak

"Dalam praktik perdagangan (internasional), jual rugi ini lazim disebut dengan istilah *dumping* (damping), yang merupakan praktek dagang yang tidak wajar dan dengan cara melakukan banting harga. Dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing usahanya dan bahkan dapat mematikan persaingan usaha yang sehat pada pasar yang bersangkutan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Penelitian hukum normatif adalah dengan mengkaji pasal-pasal, asas asas dan doktrin-doktrin yang beterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia. Dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh penulis adalah Regulasi jual rugi dan dampak dari jual rugi terhadap konsumen dan pelaku bisnis. Hasil penelitian ini adalah Identifikasi Jual Rugi Menurut Lembaga KPPU Menurut Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Predatory Pricing/ Jual Rugi* adalah pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindakan curang tersebut ialah ketidakstabilan ekonomi. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindakan curang tersebut ialah ketidakstabilan ekonomi khususnya bagi para subjek usaha, baik pelaku usaha maupun konsumen. Praktik persaingan yang tidak sehat tersebut menjadi alasan utama mengapa kekayaan (*income*) mengalami kesenjangan dikarenakan terfokus pada satu atau beberapa orang pelaku usaha yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi nantinya".

Kata kunci: Analisis Hukum, Jual Rugi, Persaingan Bisnis

Abstract

"In (international) trade practice, selling at a loss is commonly referred to as "dumping", which is an unfair trade practice and means slashing prices. In this way, it can result in losses for business competitors and can even kill healthy business competition in the relevant market. In this research, a legislative approach is used. Normative legal research is to examine the articles, principles and doctrines related to the problem to be studied, namely the Analysis of Anti-Loss Sale Laws on Business Competition Practices in Indonesia. In this research, what the author will study is the regulation of selling at a loss and the impact of selling at a loss on consumers and business people. The results of this research are the Identification of Selling at a Loss According to the KPPU Institution. According to Article 20 of Law Number 5 of 1999, Predatory Pricing/Selling at a Loss is the supply of goods and/or services by selling at a loss or setting very low prices with the intention of eliminating or killing competitors' businesses in the market. concerned so that it can result in monopolistic practices and/or unfair business competition. And the negative impact that will arise from these fraudulent actions is economic instability. The negative impact that will arise from these fraudulent actions is economic instability, especially for business subjects, both business actors and consumers. This unhealthy competitive practice is the main reason why wealth

(income) experiences disparities because it is focused on one or a few business actors which has an impact on social and economic disparities later”.

Keywords: *Legal Analysis, Loss Selling, Business Competition*

PENDAHULUAN

Jual rugi adalah praktik bisnis yang diatur oleh Undang-Undang antimonopoli atau hukum persaingan usaha di banyak yurisdiksi. Ini didefinisikan sebagai penetapan harga di bawah biaya dengan niat untuk merugikan pesaing atau menghancurkan pesaing. Perlindungan konsumen dari jual rugi adalah isu penting dalam hukum persaingan usaha. Jual rugi adalah praktik di mana perusahaan menetapkan harga produk atau layanan mereka di bawah biaya produksi atau biaya variabel dengan tujuan untuk menghancurkan pesaing dan kemudian mendominasi pasar. Ini dapat merugikan sesama pelaku usaha, konsumen dan menghambat persaingan yang sehat.

Dalam praktik perdagangan internasional, jual rugi kerap dikenal dengan “*dumping*” yaitu praktik dagang dengan metode banting harga dan tidak wajar. Hal tersebut menyebabkan pesaing usaha mengalami kerugian serta mematikan persaingan usaha yang sehat. *Dumping* yaitu aktivitas dagang yang dilaksanakan oleh produsen pengekspor yang dengan sengaja membanting harga, menjual murah atau rugi jika dibandingkan dengan harga jual negara lain, harapannya dapat mematikan usaha pesaing. Praktik dagang ini dapat menyebabkan kerugian dan praktik dagang yang tidak sehat. Beberapa negara seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat serta Eropa sudah melarang praktik dagang tersebut dimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Konsumen dapat mengalami keuntungan dalam jangka pendek saat praktik dagang ini, akan tetapi sesudah menyingkirkan dan menghambat pesaing, selanjutnya pelaku usaha dominal ini justru berharap menaikkan harga dengan signifikan. Harga yang telah ditetapkan hanya untuk menutupi kerugian dimana harga memonopoli yang lebih tinggi yang akan merugikan pihak konsumen. Praktik ini sebagai upaya menutup kerugian dan memaksimalkan keuntungan karena melakukan jual rendah atau jual rugi. Strategi penetapan harga rendah dapat diidentifikasi adanya keinginan pelaku usaha monopolis dalam melindungi posisi dengan memotong harga secara substansial. Perilaku tersebut supaya tidak memberikan daya tarik atau peluang bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat mempertahankan posisi dominan. Walaupun penetapan harga rendah dapat memberikan keuntungan konsumen, namun keuntungan itu hanya beberapa waktu saja, dikarenakan sesudahnya justru konsumen akan mendapatkan kerugian setelah pelaku usaha monopolis menetapkan harga yang sangat tinggi. Aktivitas usaha perlu dilaksanakan pengkajian berdasarkan “Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan mendasarkan pada kerangka analisis dan pertimbangan ekonomi”.

Selain “Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, larangan penetapan harga juga diatur dalam Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan penetapan harga di bawah harga pasar. Namun demikian Pasal 7 dan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 akan diterapkan berbeda oleh KPPU tergantung pada fakta kasus per kasus. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, sedangkan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tidak mencantumkan adanya persyaratan perjanjian”.

Salah satu substansi yang merupakan bagian dari praktik yang dilarang dalam Undang-Undang persaingan usaha ini adalah ketentuan yang mengatur tentang jual rugi. Meskipun undang-undang persaingan usaha telah melarang adanya praktik jual rugi, namun praktik jual rugi ini masih sangat sering ditemukan di Indonesia pada platform tertentu, seperti TikTok *shop* yang sempat di larang oleh menteri perdagangan dikarenakan terindikasi jual rugi, sebab menjual dengan harga setengahnya. Direktur Perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) yakni Rifan Ardianto menyampaikan bahwa TikTok hingga kini belum mengajukan izin sebagai *e-commerce*. Berbeda dengan Amerika, tidak ditemukan kasus jual rugi hingga

pada akhir tahun 1980an di Eropa. Hingga pada awal tahun 1990an, kasus pertama yang paling hangat dibicarakan adalah terkait “kasus AKZO Chemie BV v Komisi Komunitas Eropa di mana pada akhirnya pengadilan menemukan bahwa AKZO terbukti menyalahgunakan posisi dominannya di pasar untuk melakukan penetapan harga di bawah biaya variabel rata-rata. Meskipun dinilai terlambat, namun keterlambatan Uni Eropa dalam menemukan kasus jual rugi nampaknya tidak seberapa dengan kasus yang terjadi di Indonesia”. Larangan terkait jual rugi tercantum dalam “pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun mulai saat Undang-Undang tersebut disahkan hingga sampai saat ini masih belum ditemukan kasus jual rugi yang berarti. Meskipun dinilai terlambat, namun keterlambatan Uni Eropa dalam menemukan kasus jual rugi nampaknya tidak seberapa dengan kasus yang terjadi di Indonesia. Larangan terkait jual rugi tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Saat ini pemerintah memiliki regulasi tentang “*Predatory Pricing* yang di sebut Anti *Predatory Pricing Laws*, Undang-Undang Anti *Predatory Pricing* bertujuan untuk mencegah perusahaan menggunakan harga yang tidak wajar atau rendah untuk merugikan pesaing dan menguasai pasar. Demikian dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan *dumping* atau jual beli rugi (*predatory pricing*) atau menetapkan harga yang sangat rendah (*dumping*) dari harga produksi barang, jasa atau jasa barang sejenis” dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama dan perbuatan tersebut dengan sendirinya pula dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usahab tidak sehat.

Saat ini memang praktik jual rugi sedang menjamur dan terjadi di mana-mana secara terang-terangan di Indonesia, banyak yang tidak teridentifikasi karena alasan kurangnya perhatian akan kasus ini, banyak orang yang tidak *melek* akan hukum yang mengatur tentang peraturan ini, sebab menurunkan harga dengan cara jual rugi dengan maksud tertentu dianggap sebagai hak dari pelaku usaha padahal sangat berdampak buruk bagi sesama pelaku usaha, Presiden RI dalam beberapa artikel menyinggung soal jual rugi ini, karena sangat berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana identifikasi lembaga terkait pada pelaku usaha yang melakukan jual rugi?, dan Bagaimana akibat yang ditimbulkan jika pelaku usaha melakukan jual rugi?

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Penelitian hukum normatif adalah dengan mengkaji pasal-pasal, asas asas dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitumengenai Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia. Dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh penulis adalah Regulasi jual rugi dan dampak dari jual rugi terhadap konsumen dan pelaku bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Lembaga Terkait Pada Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi

1. Identifikasi Jual Rugi Menurut KPPU

Keadaan dunia usaha tidak sedikit diwarnai oleh perilaku usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha kerap memupuk insentif agar memperoleh keleluasaan mengendalikan harga dan kekuatan pasar. Pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian para pesaing misalnya mengadakan kesepakatan kolusif untuk menjalankan

praktik anti persaingan, mengatur pasar, membatasi output, mengatur harga; membuat rintangan perdagangan masuk pasar; dan melakukan pembatasan pasar.

Pemerintah dalam mengatur kebijakan tentang persaingan tidak hanya untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi namun juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan di Indonesia terkait perdagangan mengacu pada persaingan atas dasar mekanisme pasar dimana situasi dibutuhkan agar efisiensi dapat tercapai. Untuk mempertahankan dan menjaga persaingan sehat diperlukan peraturan yang menjadi payung hukum pelaku usaha dan bentuk kesiapan Indonesia dalam berpartisipasi dan menghadapi dalam era perdagangan bebas internasional. Apabila Indonesia mempunyai aturan yang baik, tidak multitafsir dan tidak tumpang tindih tentunya dapat mewujudkan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pelaku usaha dari pemerintah. Selain itu menurut KPPU, Selain membandingkan keuntungan yang didapatkan dengan tingkat suku bunga yang berlaku, terdapat berbagai *test* yang dapat digunakan dalam menentukan apakah penetapan harga yang sangat rendah oleh suatu pelaku usaha dimaksudkan untuk mematikan atau menyingkirkan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Adapun *test* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Above cost Test*

Pelaku usaha dikatakan mengandung maksud mematikan atau menyingkirkan usaha pesaing walaupun menetapkan harga jual jasa dan atau barang di atas biaya produksi rata-rata (ATC). Namun umumnya harga yang ditetapkan rendah sehingga keuntungan maksimal dalam jangka pendek akan menurun. Pada umumnya pelaku usaha akan memilih suatu tingkat produksi yang hanya menyisakan sedikit demand yang tersisa bagi pelaku usaha lain yang ingin ikut menikmati keuntungan tersebut. Pada kenyataannya tidak ada pelaku usaha baru yang akan mampu menutupi biaya total rata-ratanya pada tingkat harga yang sudah berlaku. Dengan mengorbankan sebagian keuntungannya, pelaku usaha incumbent pada umumnya akan membiarkan pelaku usaha pesaingnya berada tetap diluar pasar. Apabila hal ini telah terpenuhi, maka selanjutnya pelaku usaha incumbent akan berusaha memperoleh profit yang melebihi tingkat keuntungan yang diperoleh dari pasar persaingan sempurna.

b. *Limit Pricing Strategy*

Strategi penetapan harga, yang dikenal sebagai *Limit-Pricing Strategy* diidentifikasi dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat tetap mempertahankan posisi dominannya. Strategi ini biasanya dilakukan dengan mengisyaratkan pada pelaku usaha pendatang bahwa dengan ikutnya pelaku usaha baru tersebut dalam industri, maka penambahan output akan menyebabkan turunnya harga sehingga berada tepat sama dengan total biaya rata-rata.

2. Identifikasi Jual Rugi Menurut KADI

Kondisi dunia usaha banyak diwarnai oleh perilaku usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan kekuatan pasar dan memperoleh keleluasaan mengendalikan harga. Dalam menciptakan kekuatan pasar tersebut, pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pesaingnya, seperti melakukan pembatasan pasar (*market restriction*), membuat rintangan perdagangan (*barrier to entry*) masuk pasar, mengadakan kesepakatan kolusif (*collusive agreements*) untuk mengatur harga, membatasi output, mengatur pasar, dan menjalankan praktek anti persaingan lainnya.

Pelaku atau negara pengekspor dalam perdagangan yang memberikan harga rendah pada produk di pasar domestik negara pengimpor dapat menyebabkan kerugian terutama bagi industri yang mempunyai produk sejenis yang dijual dengan harga rendah.

Aktivitas menjual dengan harga rendah dapat dikatakan praktik *dumping* yang mana akan menyebabkan ruginya pelaku usaha yang menjadi saingan dan rusaknya pasar.

Indonesia telah meratifikasi ketentuan “*Agreement Establishing WTO*, termasuk ketentuan tentang antidumping yang dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing WTO*. Konsekuensi dari Indonesia meratifikasi ketentuan hukum internasional adalah Indonesia memiliki kewajiban untuk memasukan hukum internasional kedalam hukum nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya bangsa. Ketentuan tentang Anti *dumping* diatur dengan disisipkan kedalam undang-undang kepabeanan pada pasal 18 dan 19 dan dibentuk lembaga Komite Anti *Dumping* Indonesia (KADI) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan *dumping* di Indonesia”.

Jual rugi dengan menggunakan istilah *dumping* diatur pada “Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan”.

3. Disharmonisasi Peraturan KPPU dan KADI

Pelaku atau negara pengekspor dalam perdagangan yang memberikan harga rendah akan memberikan kerugian terutama untuk industri negara pengimpor yang mempunyai produk sejenis. Aktivitas menjual produk dengan harga rendah tersebut dinamakan praktik *dumping*. Praktik *dumping* dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing dan rusaknya pasar.

Dumping tidak dapat terlepas dari hukum nasional Indonesia tentang persaingan usaha yang diatur dalam “Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999), sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ahli hukum persaingan usaha, yaitu Rachmadi Usman menyebutkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan *dumping* atau menjual rugi (*predatory pricing*) dan Andi Lubis menyebutkan bahwa praktek jual rugi (*predatory pricing*) sebagai praktek *dumping*. Terlihat bahwa UU Persaingan usaha juga mengatur permasalahan mengenai *dumping* sebagai praktik jual rugi (*predatory pricing*) pada pasal 20 dan terdapat lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”. Hukum antidumping mengatur jual rugi dengan menggunakan istilah *dumping* dan hukum persaingan usaha mengatur jual rugi dengan menggunakan istilah *predatory pricing*.

Ada beberapa disharmonisasi definisi antara dua aturan yang sama-sama mengatur tentang jual rugi yaitu menurut “UU No. 17 Tahun 2006 *Dumping/ Jual Rugi* adalah menjual suatu produk dengan harga lebih murah atau rendah daripada di negara asal produk tersebut di bawah harga normal untuk produk sejenis, sementara menurut Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Predatory Pricing/ Jual Rugi* adalah Pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Persamaan *dumping* maupun *predatory pricing* yaitu sama-sama dengan sengaja memberikan harga rendah dibawah normal baik dalam menjalankan usaha bersama-sama maupun sendiri yang didasarkan pada perjanjian dalam melaksanakan aktivitas usaha salah satunya perdagangan internasional melalui aktivitas impor-ekspor.

Pemerintah dalam memberikan peraturan terkait persaingan tidak hanya bermaksud dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi saja namun juga kesejahteraan ekonomi bangsa. Peraturan perdagangan di Indonesia melihat persaingan mekanisme pasar yang dimana keadaan tersebut dibutuhkan agar efisiensi dapat tercapai. Untuk mempertahankan dan menjaga agar tetap terjadi persaingan yang sehat maka diperlukan undang-undang sebagai payung hukum bagi pelaku usaha sebagai kesiapan

Indonesia dalam berpartisipasi dan menghadapi perdagangan bebas internasional. Dengan kesiapan Indonesia yang mempunyai aturan kokoh, tidak multitafsir dan tidak tumpang tindih dapat mewujudkan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan hukum.

Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelesaikan masalah jual rugi di Indonesia.

Adanya undang-undang diharapkan dapat menjembatani kepentingan jual rugi, baik dalam bentuk *dumping* dan *predatory pricing*, sehingga dengan adanya penambahan indikator diharapkan juga dapat melindungi pelaku usaha dengan mewujudkan persaingan yang sehat.

Akibat Hukum Praktik Jual Rugi

1. Akibat Jual Rugi Untuk Negara

Adanya praktik kecurangan dalam dunia usaha persaingan nantinya mengakibatkan efek negatif bagi banyak pihak. Efek negatif yang ditimbulkan yaitu ketidakstabilan ekonomi. Oleh sebab itu, "Presiden Joko Widodo dalam pidatonya selalu menegaskan bahwa tidak ingin ada praktik perdagangan yang tidak fair, apalagi menghancurkan keberlangsungan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia".

Perdagangan tidak *fair* dalam bentuk jual rugi atau banting harga produk impor yang disinyalir berlaku di beberapa *platform e-commerce* sehingga menghancurkan UMKM. Presiden menegaskan tak ingin Indonesia menjadi pasar semata. Indonesia menganut keterbukaan ekonomi dan bukan bangsa yang menyukai proteksionisme. Sebab banyak sekali hal yang diakibatkan oleh tindakan jual rugi ini akan kestabilan ekonomi di Indonesia.

2. Akibat Jual Rugi Untuk Pelaku Usaha

Efek negatif yang ditimbulkan dari perilaku kecurangan yaitu ketidakstabilan ekonomi terutama oagi para subjek usaha bagik konsumen ataupun pelaku usaha. Praltik persaingan yang tidak sehat menjadi alasan utama mengama income mengalami kesenjangan karena fokus pada satu ataupun beberapa pelaku usaha dimana akan berakibat pada kesenjangan ekonomi dan sosial. Setiap pelaku usaha mempunyai hak masing-masing dalam melaksanakan praktik usaha sesuai keinginan dengan catatan tidak melakukan pelanggaran. Kompetitor dalam melakukan usaha harus dimaknai dengan bentuk memotivasi supaya usaha makin meningkat. Praktik tidak sehat dalam usaha misalnya monopoli dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pasar yang berlanjut pada over power bagi beberapa pelaku. Sehingga pemerataan atas peluang suatu usaha tidak dapat direalisasikan.

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait persaingan dalam dunia usaha di Indonesia berupa "UU 5/1999 bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya konflik antar pelaku usaha. Selain itu adanya paraturan tersebut menjadi sebuah bentuk langkah preventif atas segala gejolak yang terjadi di pasar". Dalam konteks kepastian hukum di masyarakat, terkandung beberapa poin tujuan diberlakukannya peraturan ini, yaitu:

- a. "Dengan tujuan menciptakan tertib sosial di masyarakat khususnya dalam menjalankan praktik ekonomi supaya lebih efektif dan efisien;
- b. Dengan tujuan merealisasikan suatu dunia usaha yang nyaman tanpa adanya tindakan curang dari seorang atau sekelompok pelaku usaha demi luasnya kesempatan berusaha yang setara antar pelaku usaha dari yang terkecil hingga terbesar;
- c. Dengan tujuan terhindar dari tindakan persaingan berupa monopoli pasar dan kecurangan lainnya;
- d. Dengan tujuan merealisasikan efektivitas dalam sektor perekonomian dalam bidang usaha di Indonesia".

Tindakan yang melanggar hukum harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini khususnya dalam “UU Nomor 5/1999 bagian tentang persaingan usaha yang tidak sehat disebutkan bahwa masing-masing pihak atau penyelenggara memiliki batasan untuk melakukan usaha”. Setiap perbuatan melawan hukum harus disertai dengan resiko yang harus ditanggung oleh pihak terkait. Tindakan menjual rugi barang dan atau jasa dalam praktik ekonomi nantinya akan menimbulkan praktik-praktik persaingan yang tidak sehat. Tindakan tersebut mengakibatkan para pesaing dalam sektor usaha yang sama atau serupa akan tersingkir atau bahkan menghambat usaha baru masuk kedalam pasar.

Pada umumnya penjualan dengan kerugian (*undercutting*) memberikan dampak yang menguntungkan bagi konsumen karena harga jual barang dan/atau jasa sangat rendah, namun keuntungan tersebut hanya bersifat jangka pendek atau sementara. Tujuan para pelaku ekonomi yang terlibat dalam praktik *predatory pricing* adalah pendekatan berorientasi rencana jangka panjang yang mendorong pesaing ke dalam kebangkrutan, yang pada akhirnya membuat mereka gulung tikar. Ketika pesaing berhenti dan ada lebih sedikit pesaing, operator yang beroperasi dengan penjualan rugi menjalankan rencana induk permainan harga sesuai dengan praktik monopoli, karena konsumen dengan pangsa pasar sasaran tidak punya pilihan selain membeli. Dari mitra bisnis dekat karena pesaing lain bangkrut dan menutup operasinya. Diketahui bahwa praktek ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menutupi kerugian yang timbul dalam proses penjualan dan penjualan dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan operator lain.

Selain sanksi tersebut, ada pula pengenaan sanksi perdata bagi pelaku pelanggaran peraturan tersebut berupa sanksi dalam bentuk “denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan pengenaan denda maksimal sebesar Rp. 25.000.000.000. Sanksi pidana menurut Pasal 48 berupa kurungan sebagai pengganti denda selamalamanya 5 bulan. Selain sanksi tersebut, tindakan yang melanggar aturan dunia usaha juga dapat berujung pada pencabutan izin usaha. Semua penipu yang salah satunya menjual produk dengan kerugian kepada konsumen barang dan/atau jasa dengan maksud merugikan atau merugikan pedagang/ pesaing lainnya, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Amar Putusan oleh KPPU kepada PT Conch Cement. Atas dasar observasi dan investigasi lapangan, Lembaga pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. “Menyatakan bahwa PT Conch Cement dengan produknya Semen Conch terbukti telah melanggar ketentuan UU No. 5 Thn 1999 khususnya delik Pasal 20;
- b. Menjatuhkan hukuman terhadap PT Conch Cement untuk membayar denda dengan jumlah Rp. 22.352.000.000;
- c. Memerintahkan PT Conch Cement membayar denda yang telah ditentukan nominalnya dengan tenggang waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap;
- d. Memerintahkan PT Conch Cement untuk menyerahkan bukti pembayaran denda atas hukuman dalam bentuk salinan dan diserahkan pada lembaga pengawas persaingan usaha dalam hal ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.

Mengenai putusan perkara ini pihak terlapor yakni “PT Conch Cement dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 22.352.000.000”. Atas penjatuhan denda kepada terlapor menurut penulis sudah sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam perundang-undangan yang berlaku, hanya saja besaran nominal denda yang menurut analisis penulis kurang tepat karena tidak adanya transparansi terkait perhitungan denda yang diberikan kepada pihak terlapor mengingat keuntungan yang diperoleh terlapor terbilang besar mencapai Rp. 587.733.585.000,00.

Hal itu dikarenakan vonis hukuman perdata yang diberikan berupa denda kepada pihak terlapor menggunakan ketentuan delik “Pasal 36 dan 47 ayat (1) UU Nomor 5/1999 yang telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 11/2020 yang mengatur mengenai

Cipta Kerja. Didalam muatan aturan tersebut menegaskan bahwa sanksi administratif dalam hal ini berupa pemberian denda dengan nominal paling rendah sejumlah Rp. 1.000.000.000 serta batas maksimal tidak ditentukan. Sehingga pemberian sanksi berupa denda sejumlah Rp. 22.352.000.000". Menurut penulis terbilang sedikit jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh PT Conch Cement mengingat tindakan terlapor telah membahayakan keberlangsungan industri semen dengan gulung tikarnya beberapa pelaku usaha semen. Dengan demikian tindakan praktik jual rugi oleh PT Conch Cement dapat dijadikan pembelajaran dan evaluasi bersama bagi subjek dalam menjalankan usaha agar supaya tidak menjalankan praktik monopoli yang nantinya akan berdampak pada terciptanya dunia persaingan usaha yang curang atau tidak sehat.

3. Akibat Hukum Bagi Konsumen

Dalam jangka pendek, jual rugi dapat menguntungkan karena konsumen menikmati harga barang atau jasa yang rendah. Namun dalam jangka panjang, setelah para pesaing tersingkir dari pasar, pelaku usaha predator akan kembali menaikkan harga barang atau jasa. Dengan demikian praktek jual rugi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, konsumen seperti tertipu dengan marketing seperti ini, sehingga pada akhirnya harga akan melonjak.

SIMPULAN

Identifikasi Jual Rugi Menurut "Lembaga KPPU Menurut Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Predatory Pricing*/ Jual Rugi adalah pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun Identifikasi jual rugi menurut Lembaga KADI yaitu jual rugi dengan menggunakan istilah *dumping* diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan". Dan untuk kesimpulan berikutnya Rugi untuk Negara Adanya praktik kecurangan dalam bentuk apapun di dalam dunia persaingan usaha tentunya akan menyebabkan dampak negatif bagi banyak pihak. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindakan curang tersebut ialah ketidakstabilan ekonomi. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindakan curang tersebut ialah ketidakstabilan ekonomi khususnya bagi para subjek usaha, baik pelaku usaha maupun konsumen. Praktik persaingan yang tidak sehat tersebut menjadi alasan utama mengapa kekayaan (*income*) mengalami kesenjangan dikarenakan terfokus pada satu atau beberapa orang pelaku usaha yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Elly Erawati dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1996)
- Dr. Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Edisi Kedua. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jakarta.
- DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati. "Praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Elsi Kartika Sari dan Avendi Situmorang, "*Hukum Dalam Ekonomi*". Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- KPPU. "Draft Pedoman Pasal 20 Tentang Jual Rugi "dalam <https://kppu.go.id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-20-tentang-jual-rugi/>
- M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing,

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya diIndonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prof. Dr. Rachmadi Usman, 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013)
- Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan
- Wahyu Buana Putra, dkk. "Akibat Hukum Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen di Indonesia" *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol.2 No. 3 September 2023.